

POLITIK PERBEDAAN: MINORITAS DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

M. Dian Hikmawan

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122

Email: dionk_90@yahoo.com

Abstract

Public policy is always closely connected with the articulation of a distribution and re-distribution. Wisest form of policy that can accommodate all people without exception. Therefore, in the implementation of the public policy, it's important to view the differences of social group not as a threat. but recognizing them through the political differences. Imbalances in the system which is too liberal governance is always to make people as several individuals with their rights. Finally, the policy only view the majority as a strong power which able to exclude those who are weak and considered different from the majority rule. This article at least invites us to re-articulate what is to be achieved in a democracy by analyzing the implementation of policy for difference groups are excluded by majority rule.

Keywords: *politics of difference, minority, majority, public policy*

PENDAHULUAN

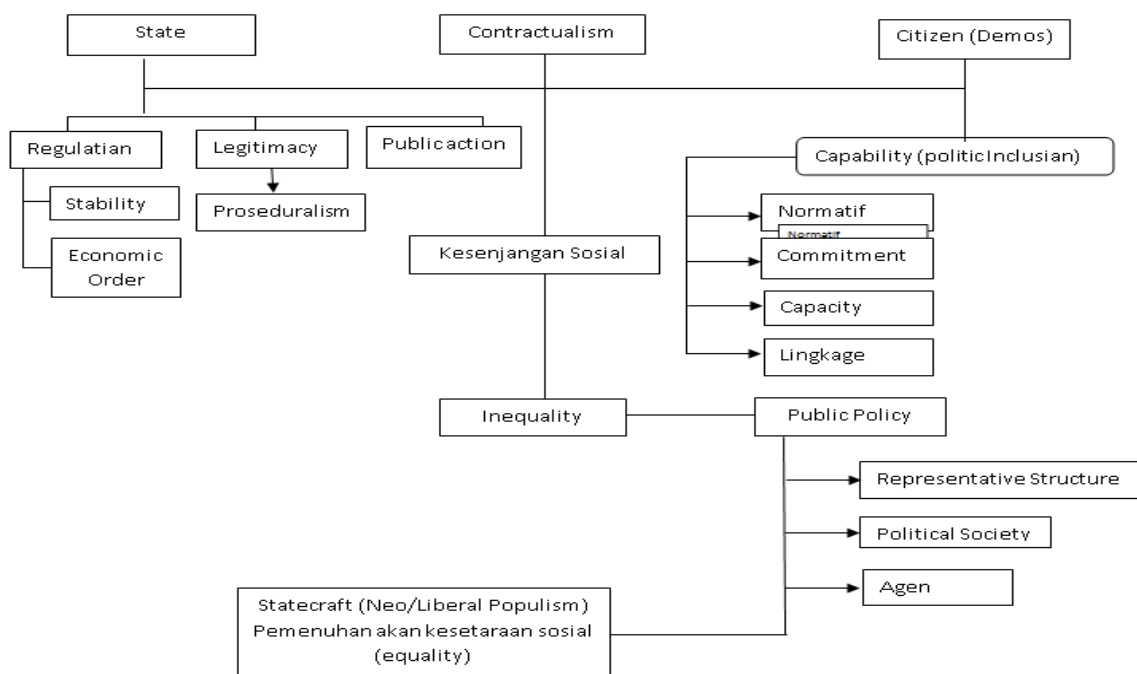
Permasalahan kebijakan publik selalu erat hubungannya dengan artikulasi dari sebuah distribusi dan re-distribusi. Negara liberal selalu dihadapkan pada bentuk-bentuk baru dari sebuah sistem pasar. Artikulasi pasar yang bebas sekarang diikuti instrumen negara yang bernama *public policy* yang bertujuan untuk distribusi dan re-distribusi bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam praktik liberalisme ternyata menghadirkan ketidaksetaraan (*inequality*), hal itu dapat terjadi karena liberalisme menjamin hak individu sebagai kedaulatan tertinggi. Selanjutnya yang menjadi akar permasalahan pengakuan akan hak-hak yang berbeda dari kumpulan individu yang menjadi mayoritas menjadi realitas yang tidak

dapat terlepas dari kehidupan kita sekarang. disinilah *public policy* hadir untuk membantu mewujudkan *equality* dalam demokrasi. Namun ternyata *good governance* yang menjadi wacana dalam mengimplementasikan kesetaraan, ternyata menimbulkan masalah baru yaitu membuat sebuah garis demarkasi dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang kuat (majority) karena mereka dianggap sebagai kumpulan-kumpulan individu dalam jumlah besar yang memegang kebijakan dan yang lemah terhadap kebijakan minority (Young, 2000: 15). Kapabilitas menjadi sangat penting karena merupakan sebuah tolak ukur sejauh mana *citizen* mampu bertahan dalam skema Neo/liberalisme yang serba kompetitif dan profit yang coba dibangun (Hoppe, 2008: 250).

Dalam hal demikian seharusnya implementasi dari sebuah kebijakan harus melihat minoritas sebagai ke khususan yang memerlukan perhatian lebih. Model contractualism-pun hanya memberikan wajah baru pada definisi *statewelfare*, diamana *state* dan *citizen* mebuat relasi yang memberikan ruang bagi citizen (demos) dalam konsensus partisipasi yang membentuk majority dan meng-eksklusi minority. Pada dasarnya konsensus yang memberikan ruang pada adanya partisipasi, namun partisipasi yang tidak di ikuti dengan kesadaran terhadap warganegara yang berbeda dan beragam hanya akan menghasilkan sebuah produk politik yang seragam, seragam dalam artian atribut mayoritas.

Keseragaman dalam kebijakan membuat tatanan antara majority dan minority menjadi produk politik yang hegemonik. Dalam situasi seperti ini. kebijakan publik harus melihat apa ulang apa yang menjadi sifat derifatif dari

demokrasi. Tidak hanya membuat kebijakan yang menguntungkan atau berpihak pada (majority), tetapi juga harus bisa menjamin minority sebagai bentuk pluralitas. Bentuk kebijakan yang bijak tidak lain bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Young, 1990: 18). Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan, melihat perbedaan bukan sebagai ancaman. Tetapi mengakui mereka melalui politik perbedaan menyamakan mereka sebagai warga negara. Ketimpangan dalam sistem *governance* yang serba liberalis adalah selalu mnjadikan individu sebagai kumpulan individu dengan hak-hak nya. Akhirnya kebijakan hanya melihat mereka yang kuat (majority) sehingga dapat mengeksklusi mereka yang lemah (minority) yang dianggap berbeda dari majority. Setidaknya saya mernagkumnya dalam sebuah skema dalam menguraikan bagaimana posisi-posisi subjek. Lihat gambar dibawah:



Demokrasi A-simetrisitas

Memaknai demokrasi merupakan hal esensial yang sedari awal coba dibangun yaitu *equality*. Prosuderalism mereduksi demokrasi dalam segala bentuk sehingga demokrasi dimaknai sebagai rutinitas dalam ketertiban ekonomi (Parthasarathy, 2011: 271). Karena liberalisme lahir dari sebuah ingatan atas hak individu dan liberalisme ekonomi merupakan sebuah konsekuensi logis dari individu yang dipandang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mewujudkan yang terbaik bagi dirinya (Mill, 1884: 3). Gagasan *welfare liberalism* menjadi semakin dianggap penting karena negara dirasa harus turut serta dalam mewujudkan *welfare* dalam iklim persaingan bebas. Namun pertanyaan selanjutnya adalah sejauhmana negara bisa menjamin kesetaraan sosial itu dapat terdistribusi secara merata (Simonis, Joachim, dan Bröchler. 2010: 37). Bila kita melihat ada kesenjangan yang memisahkan antara demokrasi dengan liberalisme, yaitu residu terhadap *inequality* itu sendiri. tujuan demokrasi adalah *equality* sedangkan liberalisme adalah individu dengan segala kapasitasnya. Sebesar apapun besar peran *state* dalam mengantisipasi kesenjangan sosial akibat dari konsekuensi dari sebuah kekuasaan yang dimaknai sebagai kumpulan individu (Young. 1990: 41). Group sosial yang berbeda sering dianggap sebagai minoritas harus mampu hidup dalam *majority rules*.

Kegagalan Neo/liberalisme ini adalah ketidakmampuannya dalam menjawab permasalahan dalam *collectivism* (Park, 2008:1013). Mengapa kolektifisme, karena dari elemen tersebut *equality* lahir. Liberalisme gagal dalam melihat kolektifisme sebagai jalan keluar. Keynes sebelumnya mencoba dengan menolak *self-regulating market* yang diyakini ekonomi klasik sebagai jalan keluar (Keynes, 1936: 57). Tetap harus ada control regulating dari negara untuk distribusi *welfare* bagi demos yang tidak mampu dalam mengantisipasi persaingan bebas. *Public policy* menjadi instrumen negara dalam hal ini, namun pada dasarnya juga ada hal yang tidak dihitung dalam regulating tersebut. *Domestic welfare* sebagai karakter dari citizen.

Agregative Structure (Kumpulan Individu) dan Politik Perbedaan

Dalam memahami apa itu kebijakan publik, banyak para *scholar* memahaminya sebagai sebuah bentuk lain dari hal distribusi dan redistribusi. Salah satunya apa yang coba di sampaikan Grindle dalam *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Bila kita melihat uraiannya mengenai bagaimana politics dan public policy berhubungan kita mendapati dua term yang menjadi kata kunci bagi Grindle yaitu content dan context (Grindle. 1980: 8). Lebih jauh pembahsannya mengenai implementasi dalam *aggregating structure* di negara berkembang sehingga kebijakan tidak ter-implementasi sebagaimana mestinya (Knodt

dan Stoiber. 2010:83). Keyakinan grindle terhadap agregatif struktur sebagai penunjang implementasi menjadi hal yang menarik. Karena dalam sisi agregatif struktur pada intinya memberikan celah partisipasi bagi *citizen* dalam kebijakan publik (Lee. 2010: 60). Hal demikian kelebihan yang ditawarkan dalam konsep ini, namun pada yang saat bersamaan penulis melihat hal itu juga membuka celah yang menjadi kekurangannya. Dimana penulis melihat dengan kaca mata berbeda sehingga melihat celah yang sama itu (agregatif struktur) nantinya menjadi bahan tinjauan bagi politik perbedaan dalam melihat demokrasi agregatif sebagai *tools* dalam implementasi kebijakan.

Bila kita melihat ulang permasalahan dalam *dunia ketiga* adalah bagaimana *interest group* yang menjadi permasalahan sehingga tidak bisa menjadi struktur sosial yang menghadirkan *collective demand* bagi *political leadership*. Padahal dalam demokrasi dan pluralitas negara, kita mendapati grup sosial menjadi sebuah kenyataan dimana kita bisa melihat perbedaan dari grup satu dengan yang lainnya. namun disanalah seharusnya negara hadir untuk mengakomodir semua dalam kebijakan publik. Ke khawatiran grindle terhadap kelemahan dalam membentuk agregatif struktur sebenarnya disandarkan pada praktek-praktek elite politik yang mengambil peran besar dalam mengambil kebijakan baik dalam distribusi dan redistribusi tanpa partisipasi aktif dari citizens (Grindle, 1980: 15). Hal tersebut yang membuat grindle

menekankan agregatif struktur sosial untuk menghimpun kekuatan agar dapat berpartisipasi dalam kebijakan. Hal tersebut yang menjadi kejelian Grindle memasukan partisipasi dalam bentuk agregatif sosial dan memikirkan hal tersebut agar public turut serta dengan apa yang akan dijalani mereka nantinya. Namun permasalahannya timbul karena sebenarnya persoalan agregatif sosial menjadikan bentuk grup-grup sosial dalam demokrasi yang direduksi menjadi kelompok dengan suatu kepentingan. Kebanyakan public policy menekankan aktor-aktor dalam kerjanya (Abubakar, 2011: 2). Bagi negara yang plural dari grup sosial yang ada menjadi tantangan dalam distribusi dalam beragam kepentingan. Hal ini merupakan sebuah usaha juga dalam mencapai sebuah legitimasi dari sebuah kebijakan yang nantinya dapat diterima atau tidak dalam implementasinya (Wolley, 2008: 162). Model demokrasi agregat-electoral-liberal mengakomodir kepentingan dengan macam konsensus yang pada akhirnya meng-eksklusi grup sosial minoritas yang sebenarnya mereka memiliki hak dalam partisipasi guna kebijakan yang akan dihasilkan tersebut (Young. 1990: 43). Ter-eksklusi karena agregatif majority yang menjadi dasar dari konsensus, dan mereka (minority) terpaksa masuk dalam konsensus *majority* (Young. 2000: 15)

Grup, di sisi lain, mengkonstitusi individu. Pemahaman khusus seseorang mengenai sejarah, pertalian hubungan,

dan keterpisahan, bahkan cara bernalar, mengevaluasi, dan mengekspresikan perasaan secara sebagian dikonstitusi oleh grup tempatnya terkait. Hal tersebut bukan berarti bahwa orang tidak memiliki gaya pribadi atau tidak mampu untuk mentransendensikan atau menolak identitas grup. Ini juga tidak berarti bahwa suatu identitas grup menghalangi seseorang dari memiliki aspek-aspek yang independen dari identitas grup. (Young, 1990: 45)

Alternatif demokratisasi yang disampaikan Young adalah tanggapan terhadap kaum liberal yang berusaha meng-idealkan Keadilan melalui konsensus mengenai *common rights*. Selama ini keseimbangan dalam masyarakat diusahakan melalui bentuk homogenitas yang tidak menampakan adanya

pertentangan. Pandangan kaum liberal tersebut lahir dari ketakutan bahwa memfokuskan pada perbedaan akan menciptakan stigma seperti di masa lalu, seperti rasisme ataupun seksisme. Liberalisme hanya menganggap bahwa *minority group* hanya sebagai bentuk dari *inconsistent* terhadap hak individual mereka (Banks, 2008: 131) Demokrasi konsensus belum menjadi usaha kepentingan politik seluruh anggota masyarakat karena pada akhirnya dikonstitusi oleh bentuk autokrasi yaitu sentralisasi oleh pemerintah pusat dan korporasi oleh kelompok dominan (Mouffe, 2005: 99) yang dalam liberalisme adalah mereka yang menyandang atribut rasional. Contoh diskriminasi yang terjadi di Indonesia, dalam berbagai hal yang menjadi permasalahan dari timbulnya majority dan minority dalam masyarakat liberal.

Tabel 1. Beberapa Kasus Diskriminasi Terhadap Minoritas Di Indonesia

Waktu & Tempat Peristiwa	Keterangan
awal 1967	Militan Muslim menyerang properti Kristen di Meulaboh di Aceh, Makassar di Sulawesi, dan Jakarta, mengklaim mereka melawan “Kristenisasi
Sejak 2002, Batuplat, kecamatan Alak, Kupang,	Muslim Batuplat, menghadapi kesulitan mendirikan masjid karena protes dari umat Kristiani di daerah mayoritas Kristen tersebut. Beberapa kelompok Kristen menentang komunitas Muslim memakai bangunan mereka untuk shalat Jumat.
2006	Kasus pelarangan pendirian rumah ibadah baru di wilayah mayoritas. SKB tiga menteri 2006 menjadi pembenaran. Tercatat ada sebanyak 12 kasus baik itu di mayoritas kristen dan mayoritas muslim
antara 1993 dan 2007	Gereja HKBP Ciketing. Mereka selalu gagal meski sudah memenuhi syarat minimal jumlah tandatangan dari warga setempat guna membangun gereja. Mereka menghadapi intimidasi terus-menerus, dua kali pembakaran, dan kekerasan sejak berusaha mendirikan gereja pada 1993
14 Februari 2008, Bekasi	Dinas Tata Kota dan Pertamanan Bogor mendadak

	membekukan izin bangunan GKI Yasmin tanpa memberi alasan jelas.
Juni 2008	Di keluarkannya surat keputusan bersama anti-Ahmadiyah. akibatnya, sedikitnya 30 masjid Ahmadiyah disegel.
Pada 6 Februari 2011 di desa Umbulan, Cikeusik, kawasan Barat Jawa	Sekitar 1.500 militan Islamis menyerang 21 jemaah Ahmadiyah dengan batu, bambu dan golok.
Agustus 2011, Riau	Pembakaran gereja Pantekosta di Kuantan Singingi, Riau
2011, Bangil, dekat Surabaya, Jawa Timur	Lebih dari 200 militan memasuki YAPI dan menghancurkan properti sekolah. Dan sejak 2010 sering terjadi penyerangan serupa.
Oktober 2010	Antonius Richmond Bawengan, pengkhotbah kontroversial dari Jakarta, membagikan selebaran tentang tiga agama Nabi Ibrahim (menawarkan tafsiran sendiri, yakni Yehova Yudaisme, Yesus Kristus Kristiani, dan Islam Allah). Selebarannya memicu kemarahan kalangan Muslim di Temanggung, Jawa Tengah, mendorong polisi menangkapnya.
20 Maret 2012, Bekasi	Kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah baru penganut HKBP Filadelfia
12 Februari 2012, Bekasi	Walikota Bekasi menyegel tiga gereja setelah ada tekanan dari FPI Bekasi: Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI), HKBP Kaliabang, dan Gereja Pantekosta.
Mei 2012, di Singkil, Aceh selatan	Militan FPI melakukan memprotes gereja “illegal” dan menuntut pemerintah menutupnya. Hasilnya pemerintah Singkil menyegel 19 gereja dan satu rumah ibadah kepercayaan lokal. Seluruh rumah ibadah ini sebenarnya dibangun sebelum ada peraturan 2006
2012	Bertahun-tahun, sekelompok Sunni gencar berkampanye menentang komunitas Syiah di kabupaten Sampang, Madura, dan melawan ulamanya, Tajul Muluk. Pada Juli 2012, Muluk didakwa tuduhan penodaan dan dihukum dua tahun penjara. Pengadilan tinggi menaikkan hukuman jadi empat tahun penjara.
Maret 2012	Penuntutan pidana terhadap Andreas Guntur, guru spiritual Amanat Keagungan Ilahi, yang dipenjara empat tahunoleh pengadilan Klaten, Jawa Tengah, karena tuduhan mengajarkan Islam yang berbeda dari yang diyakini kebanyakan Muslim
10 Mei 2012	Sekelompok orang, mengenakan pakaian yang diidentifikasi anggota Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), mengganggu diskusi Manji di Lembaga Kajian Islam dan Sosial, sebuah perusahaan penerbitan Yogyakarta. Anggota MMI memecahkan jendela dan menendang serta memukul sejumlah peserta diskusi.
	Dan lain lain : beberapa diantara diskriminasi dalam pembuatan KTP, pencatatan pernikahan, akte kelahiran, serta diskriminasi di tempat tempat publik, seperti di sekolah pada anak anak penganut keyakinan minoritas.

Sumber : Human Rigths Watch: *“In Religion’s Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia”*

Dalam hal seperti inilah bagaimana kebijakan publik seharusnya dibuat agar dapat mengakomodir semua perbedaan yang ada. Implementasi dari sebuah kebijakan publik seharusnya juga memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Tidak hanya mengakomodir apa yang menjadi keinginan mayoritas, namun harus bisa menjangkau terhadap minoritas juga. Oleh karena itu dibutuhkan teori politik yang menghargai dan mengakomodasi perbedaan dalam menghadapi stigma dan ketakutan tersebut. Sudut pandang yang mendasari politik perbedaan adalah perbedaan bukan keliyanaan, oposisi yang eksklusif, tetapi merupakan variasi heterogenitas (Young, 1990: 171). Oleh karena itu konsep keadilan yang disampaikan oleh Young berusaha agar setiap grup sosial memiliki hak untuk merepresentasikan kepentingannya dalam ranah publik (1990: 184). Merepresentasikan suara dari grup sosial yang mengalami penindasan berarti mentransformasikan posisi mereka menjadi setara dengan kelompok yang selama ini telah dominan dalam pembuatan kebijakan publik.

Paradoksial dalam Content dan Context Sebagai Implementasi (*Public Policy*)

Dalam kebijakan publik yang akan di implementasikan. Grindle melihat ulang content atau program menjadi hal yang penting dimana untuk mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut dapat terlaksana (Grindle. 1980: 9). Di lain sisi beliau melihat context

juga sebagai pengaruh dari *political situation*, sejauh mana pula kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan *group or individual demand* dalam lingkungannya (Grindle. 1980: 13). Namun kita juga pada situasi ini kita melihat sebuah paradoksial saat content dan context dijadikan ukuran dalam implementasi namun hanya sebatas *tools* bukan untuk hasil keputusan, karena *decision maker* tersebut pada akhirnya hanya diberikan pada aktor-aktor (Grindle. 1980: 20), yang mana aktor-aktor *decision maker* tersebut adalah agregatif struktur grup.

Decision maker justru akan mereduksi dari setiap partisipasi, dan agregatif sebagai dominan partisipatif memiliki peranan besar dalam *desicion maker*. Hal tersebut merupakan sebuah cara bagaimana kita melihat kebijakan publik dalam hal mengakomodir perbedaan dan kepentingan. Model agregatif truktur dalam konsensus liberal hanya fokus terhadap cara implementasi dan agregatif struktur sebagai kekuatan terbanyak (*majority*). Menjadi sebuah permasalahan baru bila kita tidak melihat ulang bagaimana kebijakan tersebut dalam distribusi dan redistribusi keadilan bagi semua lapisan *citizens* (Young, 2000: 27). Model agregatif konsensus selalu mensyaratkan eksklusi grup minoritas karena keputusan disandarkan kepada hasil agregatif (*majority*), atau yang lebih memprihatinkan adalah *common rights* diasumsikan menjadi suara terbanyak atau yang dominan dari suatu grup. Agregatif strukturlah akhirnya yang mengambil keputusan dan

keputusan tersebut hanya partisipasi dari grup dominan.

Kekurangan terbesar menjadikan kebijakan hanya berbasis sekumpulan individu yang bersepakat adalah menghilangkan keberbedaan dari yang bersepakat. Mayoritas sebagai *stakeholder* yang memiliki kekuatan besar bisa saja merupah hasil dari kebijakan yang akan dihasilkan. Dalam implementasi kebijakan, pembuat kebijakan harus bisa melihat perbedaan bukan sebagai ancaman. Melainkan pembuat kebijakan harus mampu melihat hal tersebut sebagai identitas yang unik. Re-artikulasi terhadap perbedaan perlu menjadi perhatian khusus dalam menentukan kebijakan seperti apa yang akan diimplementasikan agar dapat mengakomodir semua warga negara.

“Politics of Difference” Sebagai Implementasi

Asumsi antropologis impartialitas pada akhirnya hanya terfokus pada masalah perataan distribusi keadilan karena kebutuhan setiap individu telah diketahui seragam, yaitu *primary goods* (Mouffe, 1993: 58). Padahal konsepsi tersebut malah membatasi proses evaluasi model distribusi yang sebenarnya sangat tergantung pada struktur sosial dan konteks institusional (Young, 1990: 15). Masalah lain dari paradigma distribusi adalah kenyataan bahwa *primary goods* tidak hanya menyangkut materi semata. Sayangnya hal-hal non-materi tersebut – hak, kebebasan, penghargaan diri –

di-reifikasi seakan mereka statis, bukannya dipertimbangkan sebagai relasi sosial dan proses (Young, 1990: 16).

Rekognisi terhadap kebutuhan khusus yang selama ini teropresi oleh *general will* adalah suatu langkah awal pembuatan kebijakan publik yang lebih mewakili kepentingan semua *citizens* (Young, 1990: 185), sesuai dengan nilai demokrasi. Jika pandangan umum menganggap pemberian insentif terhadap pihak tertentu dianggap sebagai ketidakadilan, justru representasi dari berbagai grup sosial sebenarnya akan membuka kepentingan grup tertentu sehingga akan mampu mengurangi ketidakadilan yang selama ini disebabkan oleh dominasi perspektif. Langkah penting dalam politik perbedaan adalah demokrasi komunikatif yang telah diperluas (Young, 1996:120).

Semua usaha tersebut bertujuan untuk memberikan kesetaraan politik dan kesetaraan sosial bagi seluruh warga negara. Ketidakmemadaiannya *universal citizenship* yang dipahami dalam kerangka kesamaan justru melahirkan paksaan untuk asimilasi bagi yang berbeda. Ironisnya, mereka akan tetap dilihat sebagai berbeda. Oleh karena itu Young mengajukan ide *differentiated citizenship* agar mereka yang mengalami ketidakadilan sosial karena dianggap berbeda dapat menjalankan kesetaraan politik yang telah mereka miliki sebagai warga negara untuk meminta perlakuan khusus agar dapat membawa pada kesetaraan sosial. Melalui

dialog antar perbedaan, kita dapat melakukan transformasi sudut pandang dan memahami kondisi sosial kelompok lain. Bahwa pada kenyataannya persepsi akan pengalaman saya juga dari perspektif tertentu akan membimbing kita untuk semakin memahami ketiadaan *general interest* dalam pembuatan kebijakan publik (Medvetz, 2010: 562). Merekognisi keunikan pengalaman yang berbeda akan memperkaya pengetahuan sosial kita serta menambah solusi dalam menghadapi masalah dalam masyarakat (Young, 1996: 128).

Kebijakan pada akhirnya tidak hanya melihat *content* dan *context*. Namun kita harus bisa melihat apa yang disebut partisipasi dan publik. Publik tidak bisa disebut sebagai public selama partisipasi hanya disandarkan pada bentuk konsensus agregatif struktural, melainkan harus bisa merekognisi semua lapisan termasuk minoritas sebagai grup yang berbeda (Young, 1996: 132). Jadi saat kita mendiskusikan ulang implementasi dari kebijakan public, kita memikirkan ulang sejauhmana model dari kebijakan yang bisa mengakomodir semua termasuk kelompok yang berbeda tersebut. baik Mouffe maupun Young menaruh perhatian terhadap kebijakan bagi *citizens* yang memiliki kekhususan sehingga kebijakan harus mencapai juga kelompok-kelompok tersebut. sehingga partisipasi juga hadir dalam kebijakan publik yang mengakomodir semua pihak tanpa eksklusi karena tuntutan agregatif yang hanya menerima yang rasional dan meng-eksklusi

semua yang diluar nalar seperti budaya, nilai, dan tradisi (Hammack dan Cohler, 2011: 175).

Daftar Pustaka

Buku:

- Mill, John Stuart. 1884. *Principle of political economy with some of their Application to social philosophy*. New Jersey: Princeton University Press.
- Keynes, John Maynard 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. New Jersey: Princeton University Press.
- Jayasuriya, Kanishka. 2006. *Statecraft, Welfare, and the Politics of Inclusion*. Dalam Principal Research Fellow Asia Research Center. Published: Murdoch University, Australi
- Merilee S, Grindle. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Mouffe, Chantal. 1993. *The Return of The Political*. London: Verso.
- _____. 2005. *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Young, Iris Marion.. 1990. *Justice and The Politics of Difference*. New Jersey: Princeton University Press.
- _____. 2000. *Inclusion and Democracy*. New York: Oxford University Press.

Jurnal :

- Basyarahil, Abubakar. 2011. *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan*.

- Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara. Tahun II, Nomor 2. pp. 3-18.
- Banks. A. James. 2008. *Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age*. Educational Researcher, Vol. 37, No. 3, pp. 129-139 Published by: American Educational Research Association. JSTORE Accessed: 03/01/2014 03:25
- Georg Simonis, Hans-Joachim Lauth, dan Stephan Bröchler. 2010. *Comparative Politics in the 21st Century*. Z Vgl Polit Wiss 4 pp. 35–54. Published online: Springerlink.com
- Human Rigths Watch. 2013. *In Religion's Name ; Abuses against Religious Minorities in Indonesia*. Published: in the United States of America.
- Hammack, L. Philip. dan Cohler. J. Betram. 2011. *Narrative, Identity, and the Politics of Exclusion: Social Change and the Gay and Lesbian Life Course*. Sex Res Soc Policy Vol 8. pp. 162–182. Published online: Springerlink.com
- Hoppe, Robert. 2008. *Scientific advice and public policy: expert advisers' and policymakers' discourses on boundary work*. Poiesis Prax 6. pp. 235–263 Published online: Springerlink.com
- Lee. T. Charles. 2010. Bare Life, Interstices, and the Third Space of Citizenship. Source: Women's Studies Quarterly, Vol. 38, No. 1/2, CITIZENSHIP pp. 57-81. Published by: The Feminist Press at the City University of New York. JSTORE Accessed: 03/01/2014 03:23
- Medvetz, Thomas. 2010. "Public Policy is Like Having a Vaudeville Act": Languages of Duty and Difference among Think Tank-Affiliated Policy Experts. Qual Sociol 33. pp.549–562 Published online: Springerlink.com
- Michèle Knodt dan Michael Stoiber. 2010. Comparative politics in the context of multilevel analysis. Z Vgl Polit Wiss 4 pp.79–102. Published online: Springerlink.com
- Parthasarathy, Shobita. 2011. *Whose knowledge? What values? The comparative politics of patenting life forms in the United States and Europe*. Policy Sci 44, pp. 267–288 Published online: Springerlink.com
- Park. W. Julian. 2008. *A More Meaningful Citizenship Test? Unmasking the Construction of a Universalist, Principle-Based Citizenship Ideology*. California Law Review, Vol. 96, No. 4. pp. 999-1047. Published by: California Law Review, JSTORE Accessed: 03/01/2014 03:28
- Young, Iris Marion. 2009. "Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship" dalam *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of The Political* ed vol. 99, no. 2.

_____. 2012. "Communication and The Other: Beyond Deliberative Democracy" dalam *Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of The Political* ed. Seyla Benhabib. New Jersey: Princeton University Press.

Woolley, Alice. 2008. *Legitimizing Public Policy*. The University of Toronto Law Journal, Vol. 58, No. 2, pp. 153-184. Published by: University of Toronto Press. JSTORE Accessed: 03/01/2014